

# Padang Ekspres

Koran Nasional dari Sumbar



KAMIS ■ 5 JULI 2018 ■ 21 Syawal 1439 H

## TERAS UTAMA

### "PR" Besar Pasca-Pilkada: HIV/AIDS dan Narkoba

"**BIDUAK** lalu, *kiambang* batawik" begitulah pepatah Minang mengajarkan. Tatkala '*biduak*' (perahu) melewati sebuah danau yang dipenuhi '*kiambang*' (paku air) atau *Salvinia spp*, ketika perahu lewat maka dengan sendirinya air pada bagian depan perahu akan terpecah, paku air akan terpisah kebagian kiri dan kanan, dan pada kedua bagian samping kiri dan kanannya akan muncuk gelombang. Namun setelah beberapa saat perahu lewat, pada bagian belakang yang ditinggalkan perahu akan kembali seperti semula; gelombang air akan kembali tenang dan paku air yang terpisah tadi akan kembali '*batawik*' (menyatu). Setelah itu, paku air itu akan kembali tumbuh bersama dan tidak dapat lagi dilihat mana garis pemisah mereka itu.



**Hardisman**  
Dosen Etika dan  
Kebijakan Kesehatan  
FK Unand

► Baca PR...Hal 7

# "PR" Besar Pasca-Pilkada: HIV/AIDS dan Narkoba

Sambungan dari hal. 1

Inilah sebuah filosofis yang diharapkan dalam sebuah gelanggang pertandingan dan perlombaan. Setiap gelanggang dan arena pertandingan ada masanya, setelah pertandingan itu usai maka setiap orang yang di atas gelanggang akan kembali berperan sesuai posisinya masing-masing. Ini jugalah yang diharapkan terjadi pasca-pilkada serentak yang telah usai dilaksanakan tanggal 27 Juni lalu. Kelompok-kelompok yang terpisah karena berbeda jagoan, aspirasi politik dan partai, kembali menyatu dalam kehidupan sosial atau bahkan saling bekerja sama sesuai profesi dan peranannya dalam masyarakat tanpa ada retak dan garis pemisah lagi.

Kita harus belajar dari fenomena Pilpres tahun 2014 lalu, hingga hari ini para pendukung tetap berada pada posisinya masing-masing. Kita bisa saksikan di berbagai media sosial, saling hujat dan saling merendahkan baik terhadap presiden ataupun calon presiden yang kalah masih saja berlangsung. Kritik yang disampaikan kadang tidak lagi membangun, namun sudah sampai pada hal pribadi yang tidak ada kaitannya dengan substansi yang didiskusikan. Ini terus terjadi karena memang dari kedua sisi tidak ada ajakan serius ataupun tindakan yang lebih nyata untuk meredakan suasana itu. Bahkan, tidak jarang tokoh-tokoh di kedua belah pihak ikut menambah keruh suasana, sehingga jadilah kita dalam lima tahun ini merasa suasana 'kampanye terpanjang' dalam sejarah.

Kita tidak menginginkan apa yang terjadi pada pilpres tersebut, terjadi juga pada pilkada ini. Jika ini terjadi pada konteks pilkada, tentunya lebih merusak keharmonisan sosial

bermasyarakat karena cakupannya yang lebih kecil dengan interaksi masyarakat lebih dekat. Misalnya, kelompok masyarakat yang terpecah saat pilkada pada pemilihan gubernur Sumatera Utara dan Jawa Tengah harus disikapi lebih arif oleh semua kandidat yang bertanding dan para pendukungnya agar tidak menyisakan perpecahan lebih lanjut.

*Alhamdulillah*, pilkada serentak untuk pemilihan wali kota di empat kota di Sumbar tidaklah terlalu memperlihatkan friksi di masyarakat. Tentunya harapan untuk kembali mewujudkan kebersamaan dan keharmonisan lebih mudah dilakukan, didukung peran kepala daerah terpilih, partai politik pendukung dan tim sukses pada kelompok yang menang ataupun kalah untuk mau saling merangkul dalam kebersamaan.

Ini jugalah yang diungkapkan dalam pepatah Jawa "*Ngjuruk tanpa bala, sekti tanpa aji, menang tanpa ngasorake*", berarti mencapai tujuan tanpa menyisakan bencana atau melukai yang lainnya dan tidak sombong tatkala menang. Dua pepatah, Minangkabau dan Jawa yang hampir bermakna sama tentunya bisa menjadi pelajaran berharga bagi para pemenang pilkada ini. Gelanggang pertandingan telah usai dan pentas telah ditutup dan piala sudah didapatkan, apa yang mesti dibaktikan selama lima tahun ke depan inilah yang menjadi lebih penting.

Setelah menyelesaikan pekerjaan rumah (PR) dalam menjalin kebersamaan pasca-pilkada ini, para kepala daerah yang akan memimpin kota selama lima tahun ke depan ini juga mempunyai PR besar lainnya, yaitu pencegahan penularan HIV/AIDS dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba.

Sesungguhnya HIV/AIDS di Sumbar atau Minangkabau

yang dikenal sebagai negeri yang religius dengan slogan "Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah," adalah sebuah paradoks karena penularan utama HIV/AIDS melalui perbuatan maksiat (perzinahan dan narkoba suntik). Namun apa hendak dikata, jumlah kasus HIV/AIDS di provinsi ini terus mengalami peningkatan dari tahun ketahun.

*Case rate* kasus HIV pada tahun 2015 dilaporkan 24,05/100.000 penduduk, artinya dengan jumlah penduduk 4,8 juta pada saat itu, maka diprediksi HIV/AIDS mencapai 1.100 kasus. Angka ini lebih tinggi dari rata-rata secara nasional (19,1/100.000 penduduk). Sehingga, tahun 2016 menjadikan Sumbar masuk dalam 10 besar dengan kasus HIV/AIDS terbanyak di Indonesia, meskipun terjadi perbaikan peringkat di tahun 2017. Penularan HIV/AIDS di Sumbar terjadi karena memang tidak efektifnya kontrol sosial terhadap prostitusi terselubung dan maraknya kasus LSL (Lelaki Seks Lelaki).

Dalam hal ini Kota Padang dan Pariaman termasuk daerah yang sering mendapat sorotan. Meskipun sudah ada Perda Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Maksiat dan Perda Nomor 7 Tahun 2014 tentang Keteriban Umum dan Ketenteraman masyarakat, dirasakan masih belum dilaksanakan secara efektif dan tegas.

Perhimpunan Konselor VCT HIV Indonesia (PKVHI) pada April 2018 menyebutkan, estimasi bahwa ada 25 ribu LGBT di Sumbar dengan 14 ribu lebih LSL non waria, 2.500 waria, dan 9 ribu lebih pelangan waria. Angka pasti pelaku LSL tentu tidaklah mungkin didapatkan karena tidak dapat dilakukan survei langsung dan pelaku tidak mudah mengakuinya, namun estimasi tersebut berdasarkan analisis em-

piris. Besarnya angka ini sangat berperan menularkan secara 'diam-diam' HIV/AIDS di masyarakat, termasuk kepada istri dan anaknya kelak.

Kejahatan dan penyalahgunaan narkoba juga menjadi ancaman yang harus menjadi perhatian serius. Secara nasional tahun 2017 Polri mencatat ada 46.000 lebih kejadian narkoba di Indonesia. Begitu juga catatan Kepolisian Daerah Sumbar yang menyebutkan ada 803 kasus kejahatan narkoba dengan tersangka lebih seribu orang pada tahun lalu. Bahkan pada trimester pertama Januari sampai Maret 2018 saja, sudah tercatat 280 kasus. Jika kita lihat pemberitaan media, setiap hari ada saja berita tentang penangkapan pengedar narkoba di daerah. Bahkan, pada Bulan Ramadhan dan malam takbiran ada juga yang ditangkap di beberapa kota dan kabupaten.

Kejahatan pengedar narkoba ini tidak berkurang dan bahkan cenderung meningkat, karena memang Indonesia sudah menjadi pasar empuk karena tingginya pemakainya. Berdasarkan survei Badan Narkotika Nasional (BNN) tahun 2017 di seluruh Indonesia diungkapkan ada 3,37 juta pemakai atau setara dengan 1,77% penduduk usia 10-59 tahun, dengan pecandu lebih dari 920.000 orang. Data BNN juga menyebutkan bahwa untuk Sumbar juga tidak bisa dipandang ringan karena terdapat 66.000 lebih pemakai, dengan estimasi 18.000 pecandu. Terlebih lagi, yang sangat mencekam adalah pada angka pemakai dan pecandu tersebut 24% nya tergolong pelajar (anak dan remaja). Hal ini tentu harus menjadi PR dan perhatian kepala daerah terpilih, dengan melakukan gerakan sosial dan politik, serta dukungan penuh terhadap penegakan hukum. (\*)